

III. METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Openal

Agar konsep-konsep dapat diteliti secara empiris, maka harus diopenalisasikan dengan cara mengubahnya menjadi variabel, yang berarti sesuatu yang mempunyai variasi nilai. Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

3.1.1 Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah dalam penelitian ini adalah alokasi belanja hibah dalam APBD tahun anggaran 2012-2013 pada provinsi/kabupaten/kota yang mengadakan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Proporsi Belanja Hibah (PBH) diukur menggunakan perbandingan antara Belanja Hibah (BH) dengan Total Belanja Daerah (TBD), dengan satuan persentase (%). Rumus pengukuran Proporsi Belanja Hibah (PHB) sebagai berikut:

$$PBH = (BH : TBD) \times 100\%$$

3.1.2 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik. Belanja bantuan sosial dalam penelitian ini adalah alokasi belanja bantuan sosial dalam APBD tahun anggaran 2012-2013 pada provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Proporsi Belanja Bantuan Sosial (PBBS) diukur menggunakan perbandingan antara Belanja Bantuan Sosial (BBS) dengan Total Belanja Daerah (TBD), dengan satuan persentasi (%). Rumus pengukuran Proporsi Belanja Bantuan Sosial (PBBS) sebagai berikut:

$$PBBS = (BBS : TBD) \times 100\%$$

3.1.3 Belanja Modal

Belanja modal di gunakan oleh pemerintah daerah untuk dan akan menambah aset atau kekayaan daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran. Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik. Belanja modal dalam penelitian ini adalah alokasi belanja modal dalam APBD tahun anggaran 2012-2013 pada provinsi/kabupaten/kota yang mengadakan pemilukada. Proporsi Belanja Modal (PBM) diukur menggunakan perbandingan antara Belanja Modal (BBM) dengan Total Belanja Daerah (TBD), dengan satuan persentasi (%). Rumus pengukuran Proporsi Belanja Modal (PBM) sebagai berikut: $PBM = (BBM : TBD) \times 100\%$

3.2. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah daerah provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan pemilu pada tahun 2013 sebanyak 134 daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sensus, yaitu seluruh populasi dijadikan obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan data pengamatan selama dua tahun yaitu tahun 2012 dan 2013.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi data pemilu provinsi/kabupaten/kota di Indonesia tahun 2013 yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berjumlah 134 daerah sedangkan data alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja modal dalam APBD provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2012-2013 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJPB RI).

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, yang menginformasikan tentang nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (*standard deviation*). Untuk menguji perbedaan alokasi belanja pada daerah sebelum dan pada saat pemilukada, dengan cara memperbandingkan rata-rata rasio belanja sebelum dan pada saat dilaksanakan pemilukada. Perbandingan perubahan (Δ) rata-rata rasio belanja digunakan untuk menguji perbedaan alokasi belanja antara daerah pada saat pemilukada dan daerah sebelum pemilukada. Rumus pada tahun 2013:

$$\Delta \text{ Rasio belanja} = \frac{\text{mean \% tahun 2013} - \text{mean \% 2012}}{\text{Mean \% tahun 2012}}$$

Rumus tahun 2012 :

$$\Delta \text{ Rasio belanja} = \frac{\text{mean \% tahun 2012} - \text{mean \% 2011}}{\text{Mean \% tahun 2011}}$$

3.5.1. Pengujian Statistik

Pengujian statistik dilakukan dengan menguji alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum dan pada saat dilaksanakan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), dari hasil pengujian ini diharapkan dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan antara alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum dan pada saat melaksanakan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Tahap-tahap pengujian meliputi uji normalitas data dengan menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov. Dilanjutkan dengan pengujian hipotesis untuk masing-masing variabel penelitian dengan Paired Samples T Test atau pun Wilcoxon Signed Rank Test. Tingkat signifikansi atau nilai alfa (α) pada

penelitian ini ditetapkan untuk seluruh pengujian adalah sebesar 0,05 atau (5%).

Penjelasan tahap-tahap pengujian sebagai berikut:

3.5.1.1. Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas penting dilakukan karena untuk menentukan alat uji statistik apa yang sebaiknya digunakan pengujian hipotesis. Apabila data berdistribusi normal maka digunakan test parametik sebaliknya apabila data berdistribusi tidak normal maka lebih sesuai dipilih alat uji statistik non parametik dalam pengujian hipotesis (Bluman, 2009).

Uji statistik Kolmogorov-Smirnov dipilih karena lebih peka untuk mendeteksi normalitas data dibandingkan pengujian dengan menggunakan grafik (Ghozali, 2006). Hipotesis nol (H_0) dinyatakan bahwa data dari masing-masing variabel penelitian pada periode sebelum dan pada saat dilaksanakan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) berdistribusi normal. Penentuan normal tidaknya data ditentukan dengan cara, apabila hasil signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi yang sudah ditentukan ($\geq 0,05$) maka H_0 diterima maka data tersebut terdistribusi normal. Sebaliknya apabila signifikansi uji lebih kecil dari nilai signifikansi ($< 0,05$) H_0 ditolak maka data tersebut terdistribusi tidak normal.

3.5.1.2. Pengujian Hipotesis

Hasil uji normalitas data digunakan untuk menentukan alat uji apa yang paling sesuai digunakan dalam pengujian hipotesis. Apabila data berdistribusi normal

maka digunakan uji parametrik, yaitu paired sample t test . Sementara apabila data berdistribusi tidak normal uji non parametrik wilcoxon signed rank test lebih sesuai digunakan. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah data dalam uji statistik mempunyai distribusi normal atau tidak (Bluman, 2009).

3.5.1.3. Paired Samples T Test (Uji sample berpasangan)

Paired Sample T Test atau uji T sampel berpasangan merupakan uji parametrik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan (Ghozali, 2006). Data berasal dari dua pengukuran atau dua periode pengamatan yang berbeda yang diambil dari subjek yang dipasangkan (Bluman, 2009), yaitu alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi/kabupaten/ kota sebelum dan pada saat dilaksanakan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada).

Paired samples t-test berguna untuk melakukan pengujian terhadap dua sampel yang berhubungan atau sering disebut sampel berpasangan yang berasal dari populasi yang memiliki rata-rata (mean) sama. Pengambilan keputusan: Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_a diterima, yang berarti terdapat perbedaan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum dan pada saat pelaksanaan pemilukada.

Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_a ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah sebelum dan pada saat pelaksanaan pemilukada .

3.5.1.4. Wilcoxon Signed Rank Test

Uji statistik non parametik yang digunakan adalah dengan wilcoxon signed rank test . Uji ini digunakan untuk menganalisis data berpasangan karena adanya dua perlakuan yang berbeda dan memiliki subjek yang sama. Dalam hal ini wilcoxon signed rank test digunakan untuk mengetahui perbedaan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah sebelum dan pada saat pelaksanaan pemilukada, dengan membandingkan masing-masing indikatornya (alokasi APBD pemerintah daerah). Menurut Ghazali (2006), uji ini memberikan bobot nilai lebih untuk setiap pasangan yang menunjukkan perbedaan besar antara dua kondisi dibandingkan dengan dua pasangan yang menunjukkan perbedaan kecil.